

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Jalan Gerilya No.07
Temanggung



Telp.0293 493 772
Kode Pos 56218



Web: bpbd.temanggungkab.go.id
Email : bpbdtmg@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Verifikator,

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

NIP.197305011996032004

NUNUNG NC, S.PI.,M.T.,.M.Sc

NIP. 19800916 200312 2003

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat tersusun. Renja BPBD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung. Renja sebagai arah dan acuan awal sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen BPBD Kabupaten Temanggung untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Disadari bahwa substansi Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan

Temanggung, 7 September 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TOTOK NURSETYANTO, S.STP

Pembina

NIP. 19830530 200112 1 005

DAFTAR ISI

JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung	24
2.3 Data Pokok Pembangunan Daerah	30
2.4 Isi-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Temanggung	59
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	60
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	68
2.7 Inovasi Perangkat Daerah	69
2.8 Prestasi dan Penghargaan	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	71
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	76
3.3 Program dan Kegiatan	77
BAB IV PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bpbd Kabupaten Temanggung	11
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Tahun 2020	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan (Iku)	23
Tabel 2.4	Perbandingan Realisasi Anggaran Dan Kinerja Tahun 2019/2020.....	24
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	25
Tabel 2.6	Cangkupan Desa Tangguh Bencana	37
Tabel 2.7	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	38
Tabel 2.8	Data Jumlah Desa Rawan Bencana	39
Tabel 2.9	Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Masa Tanggap Darurat	45
Tabel 2.10	Data Kegiatan Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Masa Tanggap Darurat	46
Tabel 2.11	Data Kerusakan Fasum/Fasos	47
Tabel 2.12	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat	48
Tabel 2.13	Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana	50
Tabel 2.14	Data Desa Mitigasi Bencana	51
Tabel 2.15	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana	58
Tabel 2.16	Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2022	61
Tabel 2.17	Usulan Program Kegiatan Masyarakat	68
Tabel 2.18	Daftar Inovasi Perangkat Daerah	69
Tabel 2.19	Daftar Prestasi Dan Penghargaan	70
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dan Keterkaitannya Dengan Pelaksanaan Visi Dan Misi Bpbd Kab. Temanggung Tahun 2022	77
Tabel 3.2	Rencana Program Dan Kegiatan Bpbd Kabupaten Temanggung Tahun 2022	79

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

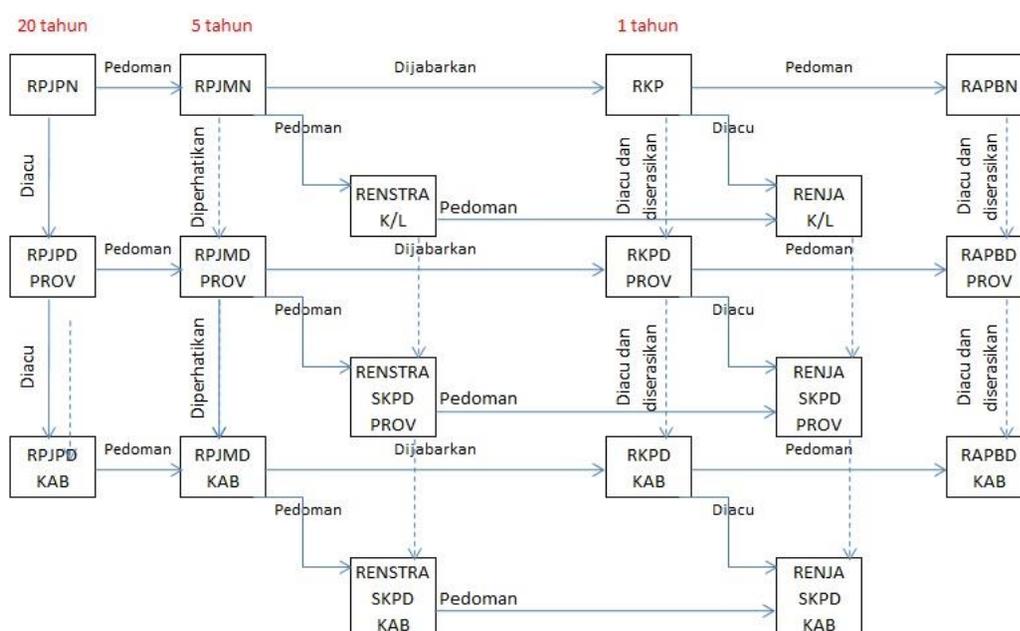
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana kerja dan Program kegiatan dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2022 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam proses ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk

perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 terhadap capaian renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
s.d Tahun 2020

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KE T
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10605	Program penanganan tanggap darurat bencana				13.120.000.000		3.034.353.420		2.920.000.000,00	2.927.784.600,00	0	2.892.787.872		98,80		5.927.141.292		45,18	
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100		100		100			90		90		90		95		
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100		100		100			100		100		100		100		
106.05.004	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	Tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat.	Bulan	60	7.700.000.000	12	1.995.889.800	12	1.700.000.000	1.839.518.000	12	1.832.594.510	100	99,62	24	3.828.484.310	40	49,72	

106.05.007	Respon Cepat Darurat Bencana	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.	Bulan	60	1.760.000.000	12	0	12	440.000.000	488.500.000	12	488.468.161	100	99,99	24	488.468.161	40	27,75	
106.05.008	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana.	Bulan	60	240.000.000	12	0	12	60.000.000	56.019.100	12	56.006.600	100	99,98	24	56.006.600	40	23,34	
106.05.009	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.	Bulan	60	2.500.000.000	12	0	12	700.000.000	543.747.500	12	515.718.601	100	94,85	24	515.718.601	40	20,63	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100				97,50			
												Predikat	Sangat Tinggi				40,00		
10606	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			48,44	5.090.000.000		353.357.250	34,81	1.485.000.000	142.584.700,00	0	131.669.500		92,34	0	485.026.750	0	9,53	
		Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47		6,67	7,62			7,04		92,39		7,04		67,24			
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	86,4		53,8	62			65,73		106,02		65,73		76,08			

106.06.001	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlatihnya 120 masyarakat di Desa Pagergunung Bulu, Desa Tegalrejo Ngadirejo, Desa Tanggulanom Selopampang	Desa	12	525.000.000	3	52.328.300	3	120.000.000	37.398.000	1	36.748.100	33,33	98,26	4	89.076.400	33,33	16,97	
106.06.011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya Dokumen RPB Kabupaten Temanggung	dokumen	1	150.000.000	0	0	1	194.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106.06.012	Pembuatan Rencana Kontijensi	Tersedianya Dokumen Renkon Bencana Erupsi Gunungapi Sumbing	dokumen	1	250.000.000	0	0	1	100.000.000	4.500.000	0	4.500.000	25	100	0,25	4.500.000	25	1,80	
106.06.013	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	Meningkatnya ketangguhan relawan destana dan Masyarakat Desa Padusreso Jumo	Kegiatan	1	600.000.000	0	0	1	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
106.06.016	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya peralatan pendukung PB di BPBD dan Kecamatan Gemawang	Kegiatan	1	185.000.000	0	0	1	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
106.06.018	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Tersedianya System Informasi Kebencanaan dengan Software bencana	Kegiatan	1	425.000.000	0	0	1	115.000.000	989.000	0	989.000	20	100	0,2	989.000	20	0,23	
106.06.019	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	Tersedianya Peralatan PUSDALOP, Rambu dan EWS	Kegiatan	1	1.450.000.000	0	0	1	400.000.000	99.697.700	0,30	89.432.400	30	89,70	0,3	89.432.400	30	6,17	

	Prasarana Kesiagaan terhadap bencana																	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			27,08		0		71,66		
											Predikat	Rendah		0		27,08		
10607	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			100	9.835.000.000		3.323.835.250	100	2.045.000.000,00	1.239.642.800,00	0	1.229.792.800		99,21	0	4.553.628.050	0	46,30
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100		100		100			100		100		100		100	
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100		100					80		80		80		80	
106.07.001	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	terlaksananya monev pasca bencana	Bulan	60	100.000.000	12	5.136.600	12	30.000.000	21.938.000	12	21.844.000	100	99,57	24	26.980.600	40,00	26,98
106.07.002	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Paket	30	9.215.000.000	17	3.274.788.900	6	1.900.000.000	1.217.403.800	6	1.207.647.800	100	99,20	23	4.482.436.700	77	48,64
106.07.003	Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Kegiatan	5	145.000.000	1	16.247.750	1	30.000.000	301.000	1	301.000	100	100	2	16.548.750	40	11,41
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100				90,00		
											Predikat	Sangat Tinggi				52,22		

40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100	177.772.000		15.533.550	100	40.000.000,00	2.282.250,00	0	2.282.250		100	0	17.815.800	0	10,02
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100		100		100			100		100		100		100,00	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan renja, RKA, DPA, LKJIP, LPPD, LKPJ	dokumen	165	25.000.000	33	4.143.550	33	5.000.000	2.282.250	33	2.282.250	100	100	66	6.425.800	40,00	25,70
407.01.073	Pengolahan data dan Informasi Bencana	Tersajinya data kejadian bencana, data korban bencana, data kerusakan akibat bencana, data rawan bencana, data potensi rawan bencana, data mitigasi dan informasi bencana yang akurat	jenis data	30	152.772.000	6	11.390.000	6	35.000.000	0	6	0	0		12	11.390.000	40	7,46
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan				100				100,00	
												Predikat	Sangat Tinggi				40,00	
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100	1.462.250.000		244.878.659	100	402.000.000,00	358.403.600,00	0	328.559.655		91,67	0	573.438.314	0	39,22

		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		100		100		100		100		100		100		100
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlunasinya tagihan rekening telpon, air dan listrik	Bulan	60	205.000.000	12	26.654.546	12	45.000.000	45.000.000	12	26.704.421	100	59,34	24	53.358.967	40,00	26,03
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih	Bulan	60	221.250.000	12	38.758.363	12	50.000.000	50.000.000	12	49.075.868	100	98,15	24	87.834.231	40,00	39,70
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	Bulan	60	80.000.000	12	13.453.000	12	20.000.000	14.506.000	12	14.157.600	100	97,60	24	27.610.600	40,00	34,51
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	80.000.000	12	13.655.155	12	20.000.000	20.000.000	12	19.673.250	100	98,37	24	33.328.405	40,00	41,66
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik kantor dan elektronika	Bulan	60	27.500.000	12	4.988.000	12	7.500.000	7.500.000	12	7.363.000	100	98,17	24	12.351.000	40,00	44,91
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai	Bulan	60	15.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	1.000.000	12	1.000.000	100	100	24	4.000.000	40,00	26,67
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum kantor dan rapat koordinasi	Bulan	60	130.000.000	12	21.649.000	12	30.000.000	21.000.000	12	20.106.000	100	95,74	24	41.755.000	40,00	32,12

407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	60	395.000.000	12	74.637.621	12	95.000.000	38.006.850	12	37.985.105	100	99,94	24	112.622.726	40,00	28,51
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	65.000.000	12	9.950.450	12	25.000.000	17.500.000	12	16.960.458	100	96,92	24	26.910.908	40,00	41,40
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS lembur PNS dan belanja transaksi keuangan	Bulan	60	35.000.000	12	4.935.000	12	15.000.000	15.000.000	12	14.900.000	100	99,33	24	19.835.000	40,00	56,67
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	Bulan	60	181.000.000	12	30.941.274	12	84.000.000	127.440.000	12	119.183.203	100	93,52	24	150.124.477	40,00	82,94
407.02.027	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Bulan	60	27.500.000	12	2.256.250	12	7.500.000	1.450.750	12	1.450.750	100	100	24	3.707.000	40,00	13,48
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100				100		
												Predikat	Sangat Tinggi				40	
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100	1.394.900.000		130.201.877	100	810.000.000,00	338.275.000,00	0	332.038.803		98,16	0	462.240.680	0	33,14
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana	%	100		100		100			100		100		100		100	

		aparatur																
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Paket	5	115.000.000	1	19.950.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	1	19.950.000	20,00	17,35
407.03.010	Pengadaan meubelair			5	30.000.000	0	0	1	30.000.000	29.500.000	1	29.500.000	100	100	1	29.500.000	20,00	98,33
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	105.000.000	12	44.298.500	12	25.000.000	11.925.000	12	11.925.000	100	100	24	56.223.500	40,00	53,55
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Bulan	60	370.000.000	12	52.064.877	12	80.000.000	77.810.000	12	74.895.303	100	96,25	24	126.960.180	40,00	34,31
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	Bulan	60	110.900.000	12	12.130.000	12	25.000.000	4.040.000	12	4.040.000	100	100	24	16.170.000	40,00	14,58
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service perbaikan printer, laptop, kompuiter, flash disk, hardisk external, kamera, mouse	Bulan	60	64.000.000	12	1.758.500	12	15.000.000	15.000.000	12	12.200.000	100	81,33	24	13.958.500	40,00	21,81
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi berat gedung kantor	Paket Pekerjaan	1	600.000.000		0	1	600.000.000	200.000.000	1	199.478.500	100	99,74	1	199.478.500	100	33,25
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100				100,00		
											Predikat	Sangat Tinggi				42,86		

40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100	335.730.000		9.730.000	100	86.000.000,00	13.178.000,00	100	11.495.000	100	87,23	100	21.225.000	100	6,32
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100		0		100			100		100		100		100	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dan atribut ASN	Kegiatan	3	50.000.000	0	0	1	20.000.000	13.178.000	1	11.495.000	100	87,23	1	11.495.000	33,33	22,99
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100					100,00	
												Predikat	Sangat Tinggi				33,33	

JUMLAH					31.415.652.000		7.111.890.006		7.788.000.000	5.022.150.950		4.928.625.880				12.040.515.886		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH												89,58	98,14			39,36		
PREDIKAT												Sangat Tinggi			Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												97,74			94,17			
PREDIKAT												Akan Tercapai			Akan Tercapai			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO .	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAI AN (%)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.128.563.743	1.088.142.513	40.421.230	96,42
1	BELANJA PEGAWAI	1.128.563.743	1.088.142.513	40.421.230	96,42
1)	Belanja Gaji dan Tunjangan	689.324.079	680.191.714	9.132.365	98,68
2)	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	439.239.664	407.950.799	31.288.865	92,88
B	BELANJA LANGSUNG	5.022.150.950	4.928.625.880	93.525.070	98,14
1.	Program penanganan tanggap darurat bencana	2.927.784.600	2.892.787.872	34.996.728	98,80
1)	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	1.839.518.000	1.832.594.510	6.923.490	99,62
2)	Respon Cepat Darurat Bencana	488.500.000	488.468.161	31.839	99,99
3)	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	56.019.100	56.006.600	12.500	99,98
4)	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	543.747.500	515.718.601	28.028.899	94,85
2.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	142.584.700	131.669.500	10.915.200	92,34
1)	Rintisan Desa Tangguh Bencana	37.398.000	36.748.100	649.900	98,26

2)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	0	0	0	
3)	Pembuatan Rencana Kontijensi	4.500.000	4.500.000	0	100,00
4)	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	0	0	0	
5)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	0	
6)	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	989.000	989.000	0	100,00
7)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapgaan terhadap bencana	99.697.700	89.432.400	10.265.300	89,70
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1.239.642.800	1.229.792.800	9.850.000	99,21
1)	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	21.938.000	21.844.000	94.000	99,57
2)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.217.403.800	1.207.647.800	9.756.000	99,20
3)	Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana	301.000	301.000	0	100,00
4.	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	2.282.250	2.282.250	0	100,00
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	2.282.250	2.282.250	0	100,00
2)	Pengolahan data dan Informasi Bencana	0	0	0	
5.	Program pelayanan administrasi perkantoran	358.403.600	328.559.655	29.843.945	91,67
1)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000	26.704.421	18.295.579	59,34
2)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.000.000	49.075.868	924.132	98,15
3)	Penyediaan alat tulis kantor	14.506.000	14.157.600	348.400	97,60
4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	19.673.250	326.750	98,37

5)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000	7.363.000	137.000	98,17
6)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000	1.000.000	0	100,00
7)	Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000	20.106.000	894.000	95,74
8)	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.006.850	37.985.105	21.745	99,94
9)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.500.000	16.960.458	539.542	96,92
10)	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	15.000.000	14.900.000	100.000	99,33
11)	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	127.440.000	119.183.203	8.256.797	93,52
12)	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	1.450.750	1.450.750	0	100,00
6.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	338.275.000	332.038.803	6.236.197	98,16
1)	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0	0,00
2)	Pengadaan meubelair	29.500.000	29.500.000	0	100,00
3)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.925.000	11.925.000	0	100,00
4)	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.810.000	74.895.303	2.914.697	96,25
5)	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.040.000	4.040.000	0	100,00
6)	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	12.200.000	2.800.000	81,33
7)	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000	199.478.500	521.500	99,74
6.	Program peningkatan disiplin aparatur	13.178.000	11.495.000	1.683.000	87,23
1)	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.178.000	11.495.000	1.683.000	87,23
TOTAL BELANJA		6.150.714.693	6.016.768.393	133.946.300	97,82

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) BPBD Tahun 2019-2020

Tujuan (IKU)	Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Cakupan Desa tangguh bencana	10,47	6,67	6,67	100	7,62	7,04	92,38	67,24

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **92.38%**.

Tabel.2.4.
Perbandingan Realisasi Anggaran Dan Kinerja
Tahun 2019-2020

No	Sasaran Strategis	2019		2020	
		% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	94,18	100	97,82	92,38

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.5
CAPAIAN KINERJA PEMBANGAUNAN DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (**LAPORAN IKPD**)
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG : BPBD																		
INDIKATOR SASARAN																		
		Cakupan desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	6,67	7,04				67,26		AT	
Jumlah Desa Tangguh Bencana										14	15							
Jumlah Desa Rawan Bencana										210	213							
INDIKATOR PPROGRAM																		
1	Program penanganan tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	90				95,00		AT	
Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani										12	9							

			Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat					12	10								
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100				100,00	TT		
			Jumlah korban bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani					239	287								
			Jumlah korban bencana pada masa tanggap darurat					239	287								
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	6,67	7,04			67,26	AT		
			Jumlah Desa Tangguh Bencana					14	15								
			Jumlah Desa Rawan Bencana					210	213								

		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	30,5	53,8	62	70,1	78,3	86,4	54,762	65,73				76,07	AT	
			Jumlah Desa Mitigasi Bencana								115	140					
			Jumlah Desa Rawan Bencana								210	213					
3	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00				100,00	TT	
			Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana yang tertangani								17	6					
			Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana								17	6					
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	80				80	AT	

		Jumlah korban bencana pada pasca bencana yang tertangani	137	4								
		Jumlah korban bencana pada pasca bencana	137	5								
Jumlah Indikator Sasaran	1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					67,26	0	1	0		
Jumlah Indikator Progra,	6	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM					86,39	2	4	0		
JUMLAH IKPD	7	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH					76,83	2	5	0		

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai (TT) ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana untuk mengkaji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan bencana.
 - b. Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana untuk mengkaji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan bencana.
 - c. Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang tepat dan bermanfaat, adanya pengkajian kebutuhan Pasca bencana untuk mengkaji kelayakan kategori Rehab rekons Pasca bencana;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan pasca bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan pasca bencana.
 - d. Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana masuk untuk mengkaji kelayakan kategori penerima

- bantuan sosial bencana.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan Sumber daya manusia dalam penanganan korban bencana.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai (AK) ada 2 terdiri dari:
- a. Cakupan Desa tangguh bencana (Jumlah Desa tangguh bencana dibagi Jumlah Desa Rawan bencana)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya kajian Risiko, Rencana penanggulangan Bencana, keterlibatan masyarakat yang telah dilatih dan adanya relawan masyarakat yang peduli bencana;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya penambahan daerah rawan bencana karena kondisi alam dan data daerah rawan masih berdasarkan sejarah kejadian belum dari Kajian Risiko bencana;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah lebih meningkatkan koordinasi dengan desa maupun perangkat daerah terait dan lebih banyak melakukan sosialisasi
 - b. Presentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan bencana (Jumlah Desa Mitigasi bencana dibagi Jumlah Desa Rawan bencana)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sudah adanya Alat peringatan dini bencana *Early Warning System* (EWS) dan rambu-rambu serta sosialisasi mitigasi bencana
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan personil dalam pemantauan ke desa setiap saat, belum optimalnya relawan dalam menjalankan tugas dan perannya;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan pelibatan relawan dan kelembagaan penanggulangan bencana di masyarakat dalam pemantauan mitigasi bencana.

2.3. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. Cakupan Desa Tangguh Bencana (Indikator Sasaran)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan

sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan **DESTANA** merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- b. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
- d. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
- e. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
- f. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a) Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b) Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- c) Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.

- d) Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
- e) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
- f) Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- g) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h) Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- i) Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
- j) Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. **Bencana adalah urusan bersama.** Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b. **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.** Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.
- c. **Pemenuhan Hak Masyarakat.** Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara,

- baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.
- d. **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.** Dalam proses mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.
 - e. **Dilakukan Secara Partisipatoris.** Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.
 - f. **Mobilisasi Sumber Daya Lokal.** Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.
 - g. **Berlandaskan Kemanusiaan.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.
 - h. **Keadilan dan Kesetaraan Gender.** Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan

gender mengantar kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

- i. **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.** Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.
- j. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- k. **Kemitraan.** Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan.
- l. **Inklusif.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan. kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.
- m. **Multi Ancaman.** Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa/kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan

bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.

- n. **Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.** Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.
- o. **Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.** Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- p. **Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.** Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Rumus Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6

Cakupan Desa Tangguh Bencana,
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	3	7	11	11	14	15
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	184	184	210	210	213
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	1.63	3.80	5.23	5.23	6.67	7.04

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 s.d TW IV terdapat peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Jumlah desa/kelurahan rawan bencana karena adanya program pembentukan Destana. Pada Tahun 2019 tidak ada pembentukan Destana, akan tetapi ada penambahan Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sehingga cakupan desa Tangguh bencana menurun dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 Triwulan I ada pembentukan Destana sejumlah 1 Desa yaitu, Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang, sehingga capaian Destana sampai dengan Triwulan IV 2020 adalah 7,04% dan capaian belum memenuhi target RPJMD yaitu 7,62%.

Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
Tahun 2015 s/d 2020 Triwulan IV

No	Tahun	JML	Lokasi		Anggota	Sumber Dana	Keterangan
			Desa/Kel	Kecamatan			
1	2015	1	Muncar	Gemawang	33	APBN	DesaTangguh Bencana
2	2015	1	Karangwuni	Pringsurat	33	APBN	DesaTangguh Bencana
3	2015	1	Getas	Kaloran	33	APBN	DesaTangguh Bencana
4	2016	1	Banaran	Gemawang	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
5	2016	1	Kebonsari	Wonobooyo	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
6	2016	1	Bonjor	Tretep	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
7	2016	1	Campurejo	Tretep	50	APBN	Kampung Siaga
8	2017	1	Ngaditirto	Selopampang	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
9	2017	1	Purwosari	Kranggan	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
10	2017	1	Sidoharjo	Candirototo	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
11	2017	1	Mranggen Kidul	Bansari	50	APBN	Kampung Siaga
12	2019	1	Kemloko	Tembarak	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 9-11 April 2019
13	2019	1	Kedungumpul	Kandangan	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 22-24 April'19
14	2019	1	Tleter	Kaloran	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 25-27 April'19
15	2020	1	Tanggulanom	Selopampang	45	APBD	Sudah terlaksana tgl 9-11 Maret 2020

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Di Kabupaten Temanggung daerah yang merupakan desa rawan bencana terjadi peningkatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 yang tadinya terdiri

dari 210 desa/kelurahan sekarang menjadi 213 desa/kelurahan rawan bencana, baru sebagian kecil desa yang telah mendapatkan program Destana. Adapun daftar desa rawan bencana sebagaimana terlampir:

Tabel 2.8

DATA JUMLAH DESA RAWAN BENCANA

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ket
1	BULU	BULU	
2		TEGALLURUNG	
3		CAMPURSARI	
4		GANDUREJO	
5		TEGALREJO	
6		GONDOSULI	
7		PUTAT	
8		DANUPAYAN	
9		MONDORETNO	
10		PANDEMULYO	
11		PASURUHAN	
12		PAKUREJO	
13		MALANGSARI	
14		PAGERGUNUNG	
15		WONOSARI	
16		BANSARI	
17		WONOTIRTO	
18		PENGILON	
19	TEMBARAK	MENGGORO	
20		KEMLOKO	
21		GANDU	
22		BOTOPUTIH	
23		GREGES	
24		KRAJAN	
25		DRONO	
26		BANARAN	
27	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG 2	
28		KOWANGAN	
29		JURANG	
30		TLOGOREJO	
31		KEBONSARI	
32		MADURESO	

33		WALITELON SELATAN	
34		JOHO	
35		MUDAL	
36		GILINGSARI	
37	PRINGSURAT	PRINGSURAT	
38		KEBUMEN	
39		KUPEN	
40		KARANGWUNI	
41		GOWAK	
42		NGIPIK	
43		PINGIT	
44		KLEPU	
45		SOBOREJO	
46		NGLOROG	
47		PAGERGUNUNG	
48		WONOKERSO	
49	KALORAN	KALORAN	
50		TLOGOWUNGU	
51		GANDON	
52		TLETER	
53		GETAS	
54		KALIMANGGIS	
55		TEMPURAN	
56		KEMIRI	
57		GEBLOG	
58		TEGOWANUH	
59		KEBLUKAN	
60		TEPUSEN	
61		KWARAKAN	
62	KANDANGAN	CARUBAN	
63		WADAS	
64		KEMBANGSARI	
65		GESING	
66		MARGOLELO	
67		BLIMBING	
68		KEDUNGUMPUL	
69		MALEBO	
70		TLOGOPUCANG	
71		KEDAWUNG	

72		BANJARSARI	
73	KEDU	KEDU	
74		CANDIMULYO	
75		SALAMSARI	
76		DANUREJO	
77		MERGOWATI	
78		KUTOANYAR	
79		KUNDISARI	
80		BOJONEGORO	
81		TEGALSARI	
82	PARAKAN	PARAKAN WETAN	
83		WANUTENGAH	
84		NGLONDONG	
85		DANGKEL	
86		WATUKUMPUL	
87		RINGINANOM	
88		CATURANOM	
89		GLAPANSARI	
90	NGADIREJO	MANGGONG	
91		NGADIREJO	
92		DLIMOYO	
93		PURBOSARI	
94		CAMPURSARI	
95		TEGALREJO	
96		GIRIPURNO	
97		KATEKAN	
98		BANJARSARI	
99		GEJAGAN	
100	JUMO	JAMUSAN	
101		KERTOSARI	
102		GUNUNGGEMPOL	
103		PADURESO	
104		JOMBOR	
105		KETITANG	
106	TRETEP	TRETEP	
107		DONOROJO	
108		NGLARANGAN	
109		SIGEDONG	
110		BONJOR	

111		TEMPELSARI	
112		CAMPUREJO	
113		BENDUNGAN	
114		SIMPAR	
115		TLOGO	
116	CANDIROTO	LEMPUYANG	
117		CANGGAL	
118		KENTENGSARI	
119		NGABEYAN	
120		BANTIR	
121		BATURSARI	
122		MUNENG	
123		PLOSOGADEN	
124		SIDOHARJO	
125	KRANGGAN	KRANGGAN	
126		BADRAN	
127		BENGKAL	
128		PARE	
129		NGROPOH	
130		PENDOWO	
131		SANGGRAHAN	
132		KLEPU	
133		KEMLOKO	
134		GENTAN	
135		KRAMAT	
136		PURWOSARI	
137	TLOGOMULYO	LANGGENG	
138		TANJUNGSARI	
139		LOSARI	
140		LEGOKSARI	
141		TLILIR	
142		GEDEGAN	
143		PAGERSARI	
144	SELOPAMPANG	TANGGULANOM	
145		JETIS	
146		SALAMREJO	
147		NGADITIRTO	
148		BULAN	
149		KACEPIT	

150		GAMBASAN	
151		BUMIAYU	
152		PLUMBON	
153	BANSARI	BANSARI	
154		MOJOSARI	
155		REJOSARI	
156		GUNUNGSARI	
157		BALESARI	
158		PURBOREJO	
159		TLOGOWERO	
160		MRANGGEN KIDUL	
161		MRANGGEN TENGAH	
162		CANDISARI	
163		CAMPURANOM	
164		GENTINGSARI	
165		TANUREJO	
166	KLEDUNG	KLEDUNG	
167		KALIREJO	
168		PAPONAN	
169		JEKETRO	
170		KWADUNGAN GUNUNG	
171		KWADUNGAN JURANG	
172		TLAHAB	
173		PETARANGAN	
174		CANGGAL	
175		JAMBU	
176		KRUWISAN	
177		BATURSARI	
178		TUKSARI	
179	BEJEN	BEJEN	
180		BANJARSARI	
181		JLEGONG	
182		PRANGKOKAN	
183		CONGKRANG	
184		KEBONDALEM	
185		KEMUNING	
186		SELOSABRANG	
187		TANJUNG SARI	
188		PETUNG	

189		DUREN	
190		NGALIYAN	
191	WONOBOYO	WONOBOYO	
192		PATEKEN	
193		PITROSARI	
194		PURWOSARI	
195		KEBONSARI	
196		SEMEN	
197		TENING	
198		WONOCOYO	
199		PESANTREN	
200		REJOSARI	
201		TAWANGSARI	
202		CEMORO	
203		WATES	
204	GEMAWANG	GEMAWANG	
205		MUNCAR	
206		KEMIRIOMBO	
207		NGADISEPI	
208		KREMPONG	
209		SUCEN	
210		KARANGSENENG	
211		BANARAN	
212		KALIBANGER	
213		JAMBON	

2. Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat Bencana (Indikator Program)

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Batasan-batasan tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana adalah semua kegiatan penanganan bencana yang dilakukan bersifat sementara untuk melindungi masyarakat, untuk membantu kelancaran ekonomi, untuk memperlancar sarana transportasi seperti pembuatan tempat hunian sementara bagi

korban bencana, pembuatan jembatan darurat penghubung antar wilayah, pembuatan/perbaikan jalan yang rusak akibat bencana, dan lainnya.

Di Kabupaten Temanggung pada kurun waktu 5 tahun banyak terjadi kerusakan fisik sarana dan prasarana umum yang harus segera ditangani pada masa tanggap darurat bencana.

Rumus Perhitungan Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada masa tanggap darurat bencana dikalikan 100%

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2020 Secara jelas tercantum pada Tabel 2.9

Tabel 2.9

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah kerusakan fisik yang tertangani masa tanggap darurat bencana	2	12	19	7	12	9
2	jumlah total kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	2	12	19	7	12	10
3	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	90

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 sampai 2019 tertangani 100%. Hal ini membuktikan bahwa penanganan cepat dari pemerintah untuk pemulihan sarana dan prasarana pada masa tanggap darurat bencana, sebagai upaya agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Capaian 100% juga disebabkan karena perhitungan kerusakan fisik tidak dihitung secara menyeluruh namun hanya kerusakan fisik fasum/fasos yang sudah melalui assessment dan kajian.

Pada Tahun 2020 ini presentase tertanganinya pemulihan sementara akibat pada masa tanggap darurat bencana menurun menjadi 90% diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran. Serta perhitungan kerusakan fisik dihitung dari kerusakan fasum/fasos dari hasil assessment Tim Reaksi Cepat dan hasil kajian. Sedangkan perhitungan tertangani hanya dihitung dari penanganan fisik yang terealisasi.

Adapun data dukung berupa kegiatan fisik yang dilaksanakan pada masa tanggap darurat sebagaimana terdapat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Data Kegiatan pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung s/d Triwulan IV Tahun 2020

No	Kegiatan saat Tanggap Darurat	Keterangan
1	Perbaikan Darurat Saluran Irigasi Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung;	APBD
2	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Desa Greges Kecamatan Tembarak;	APBD
3	Perbaikan Darurat Talud Saluran Kali Pacar Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;	APBD
4	Perbaikan Darurat Pagar Pengaman SD Negeri Rowo Desa Rowo Kecamatan Kandangan;	APBD
5	Perbaikan Darurat Saluran Drainase SMP Negeri 2 Kranggan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan;	APBD
6	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Dusun Kali Getas Jurang Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat;	APBD
7	Perbaikan Darurat Talud Sungai Tambang Dusun Mangli Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat.	APBD
8	Perbaikan Darurat Talud Puskesmas Dharma Rini Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung.	APBD
9	Perbaikan Darurat Talud Dusun Kerokan Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu	APBD

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Sedangkan data kerusakan fisik fasum/fasos akibat bencana pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
DATA KERUSAKAN FASUM/FASOS AKIBAT BENCANA
TAHUN 2020

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Tempat Kejadian
1	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Saluran Irigasi Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung;
2	Tembarak	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Desa Greges Kecamatan Tembarak;
3	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Saluran Kali Pacar Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;
4	Kandangan	Longsor	Perbaikan Darurat Pagar Pengaman SD Negeri Rowo Desa Rowo Kecamatan Kandangan;
5	Kranggan	Longsor	Perbaikan Darurat Saluran Drainase SMP Negeri 2 Kranggan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan;
6	Pringsurat	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Dusun Kali Getas Jurang Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat;
7	Pringsurat	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Sungai Tambang Dusun Mangli Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat.
8	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Puskesmas Dharma Rini Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung.
9	Kedu	Angin	Perbaikan Darurat Talud Dusun Kerokan Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu
10	Kaloran	Longsor	Dsn Jagang Ds Kalimangis Rt 04 Rw 06 Kecamatan Kaloran

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

3. Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa definisi Korban Bencana adalah Perorangan, keluarga, atau

kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Rumus perhitungan dari Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana dikali 100%. Adapun Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Persentase Tertanganinya Korban Bencana
Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung,
Tahun 2015 –2020 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah korban yang tertangani	54	85	272	222	239	287
2	jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana	54	85	272	222	239	287
3	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Menurut tabel diatas, Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s/d 2020 adalah 100%.

4. Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana

Di kabupaten Temanggung terdapat 213 desa rawan bencana, jumlah ini mendominasi lebih dari 50% dari jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Temanggung, sehingga untuk mengurangi resiko bencana yang

terjadi di daerah Kabupaten Temanggung diperlukan peningkatan kapasitas desa. Peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah mengupayakan mitigasi di desa yang rawan bencana.

Definisi Mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan definisi Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, dan lainnya.

Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik itu Bencana Alam maupun Bencana Non Alam.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pengertian Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam Implementasi yang termasuk kegiatan mitigasi bencana di antaranya :

- pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana;
- penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
- identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
- pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- kegiatan mitigasi bencana lainnya.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Rumus perhitungan persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana adalah jumlah desa/kelurahan mitigasi dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%. Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana sampai Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
 Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah desa/kelurahan mitigasi	3	44	83	111	115	140
2	jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	184	184	210	210	213
3	Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana	1.63	23.91	45.10	52.85	54,76	65.72

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana yang di mulai Tahun 2015 s/d 2020 terdapat peningkatan persentase dengan adanya program kegiatan mitigasi di desa/kelurahan rawan bencana berupa pemasangan alat peringatan dini bencana khususnya untuk peringatan dini bencana tanah longsor, sedangkan pada Tahun 2015 belum ada program kegiatan Desa mitigasi terhadap Desa Rawan bencana berupa EWS namun sudah adanya pelatihan sumber daya manusia pada daerah rawan bencana. Sehingga capaian Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana s/d Triwulan IV 2020 adalah 65.72. % hal ini lebih rendah dari capaian tahun 2019 sebesar 54,76% karena desa rawan bencana yang bertambah sedangkan desa mitigasi hanya bertambah satu karena anggaran telah dialihkan ke refocusing percepatan penanganan covid-19.

Sedang capaian target RPJMD Tahun 2020 yaitu 62 % sehingga realisasi target telah melebihi dari target. Hal ini dikarenakan adanya alat EWS (*Early Warning System*) yang dilaksanakan dengan bantuan anggaran APBN dan APBD 1 (Provinsi).

Sejak Tahun 2015 merintis desa mitigasi dengan upaya mitigasi yang dilakukan antara lain adalah dengan sosialisasi dan pemasangan EWS (*Early Warning System*) khusus tanah longsor, pemasangan plank jalur

evakuasi serta pelatihan menghadapi bencana yang pernah dilaksanakan. Berdasarkan data tersebut diatas desa mitigasi dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan selaras dengan upaya program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana pada daerah rawan bencana.

Data dukung berupa daftar lokasi pemasangan EWS tanah longsor, pelatihan serta pemasangan plank jalur evakuasi yang telah dilaksanakan sejumlah 140 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.14.

TABEL 2.14
DATA DESA MITIGASI BENCANA
TAHUN 2015-2020

NO.	DESA	KECAMATAN	TAHUN	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Muncar	Gemawang	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
2	Getas	Kaloran	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
3	Pringsurat	Pringsurat	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
4	Mranggen Kidul	Bansari	2016	EWS	APBD
5	Desa Bansari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
6	Desa Mojosari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
7	Desa Rejosari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
8	Desa Gunungsari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
9	Desa Balesari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
10	Desa Purborejo	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
11	Desa Tlogowero	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
12	Desa Mranggen Kidul	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
13	Desa Mranggen Tengah	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
14	Desa Candisari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
15	Desa Caturanom	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
16	Desa Gentingsari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD

17	Desa Tanurejo	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
18	Bansari	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
19	Mranggen Kidul	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
20	Mranggen Tengah	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
21	Bejen	Bejen	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
22	Candiroto	Candiroto	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
23	Blawong wetan Ds. Muncar	Gemawang	2016	EWS	APBD
24	Blawong Kulon Ds. Muncar	Gemawang	2016	EWS	APBD
25	Lembujati Ds.Banaran	Gemawang	2016	EWS	APBD
26	Babatan Ds.Kemiriombo	Gemawang	2016	EWS	APBD
27	Banaran	Gemawang	2016	<i>Pelatihan , EWS (APBN)</i>	APBD/ APBN
28	Pengilon Ds.Jombor	Jumo	2016	EWS	APBD
29	Kandangan Ds.Tempuran	Kaloran	2016	EWS	APBD
30	Getas	Kaloran	2016	EWS	APBD
31	Kadopokan ds.Togopucang	Kandangan	2016	EWS	APBD
32	Rowo Ds.Margolelo	Kandangan	2016	EWS	APBD
33	Sigeblok Ds.Kedawung	Kandangan	2016	EWS	APBD
34	Kedu	Kedu	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
35	Tumpang Ds.Petarangan	Kledung	2016	EWS	APBD
36	Petarangan	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
37	Canggal,	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
38	Batursari	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
39	Parakan Wetan	Parakan	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
40	Dawung dan Pucung Ds.Karangwuni	Pringsurat	2016	EWS, Pelatihan	APBD
41	Selopampang	Selopampang	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
42	Gilingsari	Temanggung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
43	Bonjor	Tretep	2016	EWS dan Pelatihan	APBD
44	Sikidang	Tretep	2016	EWS	APBD

	Ds.Tempelsari				
45	Desa Kentengsari	Candiroto	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
46	Desa Ngabeyan	Candiroto	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
47	Sidoarjo	Candiroto	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
48	Dsn Krempong Krempong	Gemawang	2017	EWS	APBD
49	Dsn Mandang Sucen	Gemawang	2017	EWS	APBD
50	Dsn Ngemplak Tleter	Kaloran	2017	EWS	APBD
51	Dsn Lamuk Kalimanggis	Kaloran	2017	EWS	APBD
52	Dsn Geblog Tlogowungu	Kaloran	2017	EWS	APBD
53	Dsn Sendang Kedungumpul	Kandangan	2017	EWS	APBD
54	Dsn Cantel Blimbing	Kandangan	2017	EWS	APBD
55	Desa Kedawung	Kandangan	2017	EWS	APBD
56	Dsn Canggal Canggal	Kledung	2017	EWS	APBD
57	Dsn Kruwisan 1 Kruwisan	Kledung	2017	EWS	APBD
58	Dsn Ngadi gunung Tuksari	Kledung	2017	EWS	APBD
59	Dsn Slagen Pendowo	Kranggan	2017	EWS	APBD
60	Dsn Dukoh Gentan	Kranggan	2017	EWS	APBD
61	Dsn Kemloko Kemloko	Kranggan	2017	EWS	APBD
62	Dsn Purwosai II Purwosari	Kranggan	2017	EWS	APBD
63	Desa Banjarsari	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
64	Desa Campursari	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
65	Desa Jumprit	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
66	Desa Pringapus	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
67	Desa Dlimoyo	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD

68	Desa Watukumpul	Parakan	2017	EWS	APBD
69	Dsn Ngesrep Ringonanom	Parakan	2017	EWS	APBD
70	Dsn tanduran Caturanom	Parakan	2017	EWS, Pelatihan	APBD
71	Dsn Jamprang Tanggulanom	Selopampang	2017	EWS	APBD
72	Desa Jetis	Selopampang	2017	EWS	APBD
73	Dsn Ngaditirto Ngaditirto	Selopampang	2017	EWS	APBD
74	Tanggulanom	Selopampang	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
75	Ngaditirto	Selopampang	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
76	Temanggung 1	Temanggung	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
77	Banyuurip	Temanggung	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
78	Desa Gandu	Tembarak	2017	EWS	APBD
79	Dsn Banaran	Tembarak	2017	EWS	APBD
80	Dsn Prampelan Kemloko	Tembarak	2017	EWS dan Pelatihan	APBD
81	Dsn Tempuran Losari	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
82	Dsn Pagersari Pagersari	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
83	Dsn Tlilir Tlilir	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
84	Mojosari	Bansari	2018	EWS	APBD
85	Tanjungsari	Bejen	2018	EWS	APBD
86	Banjarsari	Bejen	2018	EWS	APBD
87	Pagergunung	Bulu	2018	EWS	APBD
88	Bansari	Bulu	2018	EWS	APBD
89	Wonosari	Bulu	2018	<i>Plank Evakuasi, EWS</i>	APBD/ APBD 1
90	Canggal	Candiroto	2018	EWS, Plank Evakuasi, Pelatihan	APBD
91	Sidoharjo	Candiroto	2018	EWS	APBD
92	Desa Sidoharjo	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
93	Desa Canggal	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
94	Desa Limbangan	Candiroto	2018	<i>Plank</i>	APBD

				<i>Evakuasi</i>	
95	Desa Bantir	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
96	Desa Muntung	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
97	Padureso	Jumo	2018	EWS	APBD
98	Keblukan	Kaloran	2018	EWS	APBD
99	Kundisari	Kedu	2018	EWS	APBD
100	Tlahap	Kledung	2018	EWS	APBD
101	Ngropoh	Kranggan	2018	EWS	APBD
102	Desa Purwosari	Kranggan	2018	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD
103	Tegalrejo	Ngadirejo	2018	EWS, Plank Evakuasi	APBD
104	Katekan	Ngadirejo	2018	EWS	APBD
105	Wonokerso	Pringsurat	2018	EWS	APBD
106	Desa Ngaditirto	Selopampang	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
107	Drono	Tembarak	2018	EWS	APBD
108	Cemoro	Wonobojo	2018	EWS	APBD
109	Pesantren	Wonobojo	2018	EWS	APBD
110	Kebonsari	Wonobojo	2018	<i>EWS 2016 (APBD 1) Plank Evakuasi, dan Pelatihan</i>	APBD/APBD 1
111	Prangkokan	Bejen	2019	EWS	APBD
112	Malangsari	Bulu	2019	EWS	APBD
113	Pandemulyo	Bulu	2019	EWS	APBD
114	Plosogaden	Candiroto	2019	EWS	APBD
115	Kentengsari	Candiroto	2019	EWS	APBD
116	Karangseneng	Gemawang	2019	EWS	APBD
117	Tleter	Kaloran	2019	<i>Pelatihan</i>	APBD
118	Kedungumpul	Kandangan	2019	<i>Pelatihan</i>	APBD
119	Bojonegoro	Kedu	2019	EWS	APBD
120	Kwadungan gunung	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, EWS, Pelatihan</i>	APBD

121	Kalirejo	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, EWS</i>	APBD
122	Tlahap	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
123	Batursari	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, EWS</i>	APBD
124	Jeketro	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
125	Petarangan	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
126	Kwadungan Jurang	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD
127	Paponan	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
128	Tuksari	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
129	Kruwisan	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
130	Canggal	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
131	Jambu	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
132	Kledung	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
133	Klepu	Kranggan	2019	EWS	APBD
134	Glapansari	Parakan	2019	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD
135	Ngipik	Pringsurat	2019	EWS	APBD
136	Walitelon Selatan	Temanggnng	2019	EWS	APBD
137	Greges	Tembarak	2019	EWS	APBD
138	Campurejo	Tretep	2019	EWS dan Pelatihan	APBD
139	Wonoboyo	Wonoboyo	2019	EWS	APBD
140	Soborejo	Pringsurat	2020	EWS, Pelatihan	APBD

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

5. Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana

Pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun 2015 dilaksanakan melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dengan capaian persentase 100% tertangani. Menurut UU No 24 tahun 2007 yang dimaksud dengan Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pengertian Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan pengertian Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi pasca bencana adalah kegiatan-kegiatan penanganan bencana yang dilakukan pada situasi setelah terjadi bencana yang bertujuan untuk memulihkan daerah/ wilayah/ permukiman yang pada awalnya terkena dampak bencana menjadi aman dari ancaman bencana dengan dilaksanakan kegiatan perbaikan, pemulihan atau pembangunan kembali aspek-aspek kehidupan/fasilitas umum yang rusak menjadi baik Kembali, sehingga dapat difungsikan seperti sedia kala.

Rumus Perhitungan Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada pasca bencana dikalikan 100%.

Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV ini diharapkan agar sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dapat tertangani secara baik dan permanen melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Daftar Pemulihan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15

Jumlah Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada
Pasca Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah tertangani kerusakan fisik akibat bencana dalam 1 tahun melalui rahabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	18	24	11	7	17	6
2	jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 tahun pada pasca bencana	18	24	11	7	17	6
3	Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Pasca Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Waktu 1(satu) Tahun	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan analisis tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun Tahun 2015 sampai dengan 2020 mencapai 100% Hal ini didukung oleh peran pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dengan sumber pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun APBN yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan di Tahun 2020 Triwulan IV mencapai 100%.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung adalah adalah perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas Pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dengan permasalahan-permasalahan adalah Tingkat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain

- Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

- Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain :

- a. Kebencanaan meningkat yang menyebabkan Desa rawan bencana meningkat;
- b. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
- c. Peningkatan kerusakan lingkungan yang menyebabkan meningkatnya bencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dalam pelaksanaan penanganan kejadian bencana, BPBD Kabupaten Temanggung selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, sektor penanggulangan bencana, masyarakat dan dunia usaha walaupun belum maksimal. Koordinasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana sesuai tupoksi masing masing sehingga tidak saling tumpang tindih.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan sudah sesuai.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.16, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

No.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun Sesuai Renstra 2022			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	BELANJA					7.369.423.259
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.369.423.259
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.824.423.259
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	14	Bulan	1.824.423.259
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				135.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	5.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop 3 unit dan printer 2 unit	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	0
3	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya alat rumah tangga kantor	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	0

No.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	BELANJA					6.873.254.804
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.989.542.143
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.135.142.143
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	14	Bulan	1.135.142.143
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				183.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop 3 unit dan printer 2 unit	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	28.000.000
3	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya alat rumah tangga kantor	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	9.000.000

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya makanan dan minuman	Kab. Temanggung	12	Bulan	25.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	75.000.000
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlunasinya tagihan rekening telpon, air dan listrik dan menaikan daya tegangan listrik, akses internet dan paket data	Kab. Temanggung	12	Bulan	40.000.000

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	16.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya makanan dan minuman	Kab. Temanggung	12	Bulan	36.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	70.000.000
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				315.950.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlunasinya tagihan rekening telpon, air dan listrik dan menaikan daya tegangan listrik, akses internet dan paket data	Kab. Temanggung	12	Bulan	36.800.000

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, perencanaan dan umum kepegawaian, tersedianya jasa dan kelengkapan kebersihan kantor dan pelayanan kantor, tersedianya jasa dan kelengkapan keamanan kantor, tersedianya karangan bunga, upah lembur	Kab. Temanggung	12	Bulan	130.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pegawai				80.000.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya kelengkapan pakaian dinas PNS (PDH, PDL, sepatu PDL	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	25.000.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terdidik dan terlatihnya tim reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	55.000.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah				0
1	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi tamu satu set	Kab. Temanggung	1	Set	0

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, perencanaan dan umum kepegawaian, tersedianya jasa dan kelengkapan kebersihan kantor dan pelayanan kantor, tersedianya jasa dan kelengkapan keamanan kantor, tersedianya karangan bunga, upah lembur	Kab. Temanggung	12	Bulan	264.150.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pegawai				85.950.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya kelengkapan pakaian dinas PNS (PDH, PDL, sepatu PDL	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	25.200.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terdidik dan terlatihnya tim reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	60.750.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah				45.000.000
1	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi tamu satu set	Kab. Temanggung	1	Set	45.000.000

		,meja pegawai dan peralatan ruang pUSDalops				
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah				150.000.000
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya alat dan mesin untuk operasional kantor	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	20.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Temanggung	12	Bulan	75.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ rehabilitasi atap berat Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Temanggung	12	Bulan	20.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	12	Bulan	22.000.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Temanggung	12	Bulan	13.000.000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.000.000.000

		,meja pegawai dan peralatan ruang pUSDalops				
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah				224.500.000
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya alat dan mesin untuk operasional kantor	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	9.500.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Temanggung	12	Bulan	85.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ rehabilitasi atap berat Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Temanggung	12	Bulan	100.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.883.712.661

I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya informasi rawan bencana				100.000.000
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Kab. Temanggung			100.000.000
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				2.400.000.000
1	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	Kab. Temanggung			100.000.000
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kab. Temanggung			50.000.000
3	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Kab. Temanggung			0
4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen RPB Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Dok	0
5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Temanggung	7	Kecamatan	150.000.000

I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya informasi rawan bencana				0
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Kab. Temanggung			0
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				3.908.712.661
1	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	Kab. Temanggung			0
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kab. Temanggung			0
3	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Kab. Temanggung			0
4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen RPB Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Dok	150.000.000
5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Temanggung	7	Kecamatan	807.000.000

6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung			350.000.000
7	Pengembangan alat EWS Longsor	Terlaksananya review rencana kontinjensi sebagai alat peringatan dini bagi masyarakat di daerah rawan	Kab. Temanggung	20	unit	75.000.000
8	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Temanggung			50.000.000
9	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temanggung	5	desa	125.000.000
10	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pasca bencana	Kab. Temanggung			1.500.000.000
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.500.000.000

6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung			200.000.000
7	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontinjensi				0
8	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				73.600.000
9	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temanggung	5	desa	125.000.000
10	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pasca bencana	Kab. Temanggung			2.553.112.661
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				975.000.000

1	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat, pemulihan, fasilitas, fasum/fasos pada masa tanggap darurat	Terlaksananya penanggulangan darurat bencana	Kab. Temanggung	100	%	1.400.000.000	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	440.000.000	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	615.000.000
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	600.000.000	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	100.000.000
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	60.000.000	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	250.000.000
						7.369.423.259							6.873.254.804

Sumber : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPД Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPД Kab. Temanggung

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam proses ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap seluruh Perangkat daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.17

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Ket.
1	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Desa Ngadirejo Kec. Ngadirejo	Terehabnya senderan klai deres	100 m x 9 m	
2	Pelatihan Mitigasi Bencana	Kecamatan Jumo	Terlatihnya Relawan tangguh bencana	13 Desa	
3	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung	Terehabnya jembatan penghubung dari Kecamatan Kedu ke Kecamatan Temanggung	Jembatan p. 8 L 3 T. 4 t. 2 Jalan 16 m	
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kecamatan Pringsurat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan managemen Pemerintah Desa	2 Desa	
5	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Dusun Karanganyar Desa Purwosari Kec, Wonoboyo Dusun Gopakan Desa Wonocoyo Kec. Wonoboyo	Terehabnya Talud Penanggulangan Bencana alam Pencegahan Bencana alam	P. 100 m T 2,5 m L 0,3 m 1 Paket	Umum Tematik
6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa Gesing Kec. Kandangan	Peningkatan Kesiapsiagaan bencana dan Pengadaan peralatan SAR	2 Paket	
7.	Pelatihan	Desa Kaloran	Terlaksananya	2 Paket	

	Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kec. Kaloran	pelatihan dan dan tersedianya Sarana Prasarana kebencanaan		
8.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa Kutoanyar Kec. Kedu	Terselenggaranya peltihan Mitigas bencana alam	1 Paket	
9.	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Desa Petarangan Kecamatan Kledung	Terehabnya Talud dan pagar Pengaman SDN Petarangan	1 Paket	

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, terdapat 2 kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran dan ada 2 kegiatan yang sudah terrealisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
Tahun 2020 - 2022

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Peran Strategis <i>Pentahelix</i> di BPBD Kabupaten Temanggung	1.BPBD (Pemerintah) 2.Masyarakat 3.Akademisi 4.Media massa 5.Perusahaan	APBD	Terbentuknya aplikasi "Pentahelix"	Tersajinya data bencana terdiri dari lokasi, jenis bencana dan Progres Penanggulangan bencana	Meningkatnya Bantuan dari Pemerintah Bantuan dari Masyarakat Bantuan dari Akademisi Bantuan dari Media masa Bantuan dari Perusahaan	BPBD 2020
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Kecamatan	Relawan di tingkat Kecamatan	APBD	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Kecamatan	Terlatihnya Relawan kebencanaan	Meningkatnya kapasitas Relawan Bencana	BPBD 2021
3	"PUSDALOPS 247"	Karyawan BPBD, Satgas PB	APBD	Terbentuknya Pusat Data Informasi bencana	Tersajinya Data dan informasi bencana	Memudahkan pendataan dan informasi bencana	BPBD 2021

2.8. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan Penghargaan selama 3 Tahun terakhir yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Daftar prestasi dan penghargaan

No.	Kegiatan	Tahun	Penghargaan	Piagam/SK/ Sertifikat
1.	Sekretariat Gugus Tugas Covid 19	2020	No.	Terlampir
			Tanggal	
2.	Pentahelix dan Sinotika	2020	No.	Terlampir
3.	Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan “Karhutla” Gunung Sundoro dan Sumbing	2019	BNPB Jakarta	Terlampir
4.	Evakuasi pesawat Basarnas yang jatuh	2018	BASARNAS Jakarta	Terlampir

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh BPBD Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Temanggung ,

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan; 6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi :

1. **Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah**, melalui:
 - a) Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada

kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;

- c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
- d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
- e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a) Mendorong dan menumbuhkan kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
- c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
- f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
- g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:

- a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
- f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
- g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;
- h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
- i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :

1. Program Prabencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- program pengurangan risiko bencana
- program pencegahan bencana
- pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana
- penyusunan analisis risiko bencana;
- fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PB ;
- penyusunan standar teknis penanggulangan bencana

b. Potensi Bencana

- kegiatan kesiapsiagaan
- pembangunan sistem peringatan dini; dan
- kegiatan mitigasi bencana

2. Program Pasca Bencana

a. Rehabilitasi

- perbaikan lingkungan daerah bencana;
- perbaikan prasarana dan sarana umum;
- pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- pemulihan sosial psikologis
- pelayanan kesehatan;
- rekonsiliasi dan resolusi konflik
- pemulihan sosial ekonomi budaya
- pemulihan keamanan dan ketertiban;
- pemulihan fungsi pemerintahan;
- pemulihan fungsi pelayanan publik

b. Rekonstruksi

- pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- peningkatan pelayanan umum dalam masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana;
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil;
4. Fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana.

Sedangkan arah kebijakan pelayanan dalam mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA;
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa;
3. Peningkatan kompetensi Aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, Study banding dan Refress
4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sesuai kebutuhan

Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi dijabarkan dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Temanggung 2019-2023, Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM									
MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator	2018	Target Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	05. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	01. Cakupan Desa tangguh bencana	6,52	8,15	9,5	9,75	10	10,25

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2022

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6,848,054,661			0				
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,964,342,143			0				
1	5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,135,142,143			0				
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		14 bulan		1,135,142,143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1	5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					60,750,000			0				
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya kelengkapan pakaian dinas PNS (PDH, PDL, sepatu PDL		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0

1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terdidik dan terlatihnya tim reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		60,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							183,000,000							0
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		12 bulan		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Laptop 3 unit dan printer 2 unit		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya alat rumah tangga kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terpenuhinya makanan dan minuman		Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		12 bulan		36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0

1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				54,500,000		0
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi tamu satu set ,meja pegawai dan peralatan ruang pusdalops	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat dan mesin untuk operasional kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315,950,000		0
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlunasinya tagihan rekening telephon, air dan listrik serta menaikkan daya tegangan listrik, akses internet dan paket data	Kab. Temanggung, Sidorejo	12 bulan	36,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, perencanaan dan umum kepegawaian, tersedianya jasa dan kelengkapan kebersihan kantor dan pelayanan kantor, tersedianya jasa	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	264,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215,000,000		0
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/rehabilitasi atap berat Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 bulan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4,883,712,518		0
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				3,908,712,518		0

1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Temanggung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Kecamatan	807,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	73,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Desa	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pasca bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	2,553,112,518	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				975,000,000					0

1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	615,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
TOTAL									6,848,054,661		0

Sumber: SIPD (<https://temanggungkab.sipd.kemendagri.go.id/>)

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 1.088.142.513 (96,42 %) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.928.625.880 (98,14 %), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.135.142.143 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.712.912.518,- yang terdiri dari 2 Program dan 8 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan,
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan 3 Kegiatan yaitu
 - a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
 - c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TOTOK NURSETYANTO, S.STP

Pembina

NIP. 19830530 200112 1 005